



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN

WALIKOTA DENPASAR

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar;
 - b. bahwa dengan perubahan tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang semula penyelenggaraan pelayanan perijinan dilaksanakan oleh Dinas Perijinan Kota Denpasar berubah menjadi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Juli 2006 Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penetapan Rambu-Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pada Ruas-Ruas Jalan Tertentu Bagi Setiap Kendaraan di Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Denpasar Tahun 1994 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Denpasar Nomor 14 Tahun 1995 tentang Ijin Trayek Angkutan Penumpang Umum (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Denpasar Tahun 1995 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Denpasar Nomor 16 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1995 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Denpasar 23 Tahun 1995 tentang Usaha Jasa Boga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Denpasar Tahun 1995 Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Denpasar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Penggalan Jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Denpasar Tahun 1999 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Usaha Pemandokan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2001 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 24 Tahun 2001 tentang Usaha Hotel Melati (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2001 tentang Usaha Rumah Makan(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2002 tentang Usaha Bar di Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2002 tentang Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Retribusi Perijinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2003 Nomor 4);

